DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Dahlan Thaib, *Teori Hukum dan Konstitusi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1999.

Efi Laila Kholis, *Pembayaran Uang Pengganti dalam Perkara Korupsi*, Solusi Publishing, Jakarta 2010.

Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi, Sinar Grafika*, Jakarta, 2005.

H. R. Otje S, Soemadiningrat dan Anthon Freddy Susanto. *Teori Hukum Mengingat, Mengumpulkan, dan Membuka Kembali*, Refika Aditama, Bandung, 2010.

_____, *Filsafat Hukum – Perkembangan dan Dinamika Masalah* , Refika Aditama, Bandung, 2010.

Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997.

Leden Marpaung, *Tindak Pidana Korupsi Pemberantasan dan Pencegahan*, Bina Grafika, Jakarta, 2001.

Mochtar Kusumaatmadja, Hukum Masyarakat IV Pembinaan Hukum Nasional, Bina Cipta, Bandung, 1976

S.R Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapa*nnya, Cet. 4, Percetakan BPK Gunung Mulia, Jakarta, 1996.

_____, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Alumni AHM-PTHM, Jakarta, 1982.

Satochid Kartanegara, *Hukum Pidana Bagian Satu*, Balai Lektur Mahasiswa, Jakarta, 2006.

Soedijono Dirdjosisworo, *Fungsi Perundang-Undangan Pidana Dalam Penanggulangan Korupsi Di Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 2000.

Surachmin dan Suhadi Cahaya, *Strategi dan Teknik Korupsi Mengetahui Untuk Mencegah*, Sinar Grafika. Jakarta, 2011.

Peraturan Perundang-Undangan :

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme.

Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 Tentang Pengesahan United Nations Convention Against Corruption, 2003 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi, 2003)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2009 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi

Situs :

http://id.wikipedia.org

http://nasional.kompas.com

http://news.liputan6.com

http://politik.news.viva.co.id

http://www.detik .com

http://www.hukum-online .com

http://www.republika.co.id

http://www.suaramerdeka.com

http://www.tindakpidanakorupsi.org

http://definisipengertian.com.

http://www.indonesiamedia.com

http://politik.news.viva.co.id

http://nasional.sindonews.com

Jurnal :

E.Z.Leasa. *Penerapan Sanksi Pidana dan Sanksi Tindakan (Double Track System) Dalam Kebijakan Legislasi,* Jurnal Sasi Vol. 16 No. 4 Bulan Oktober – Desember 2010,